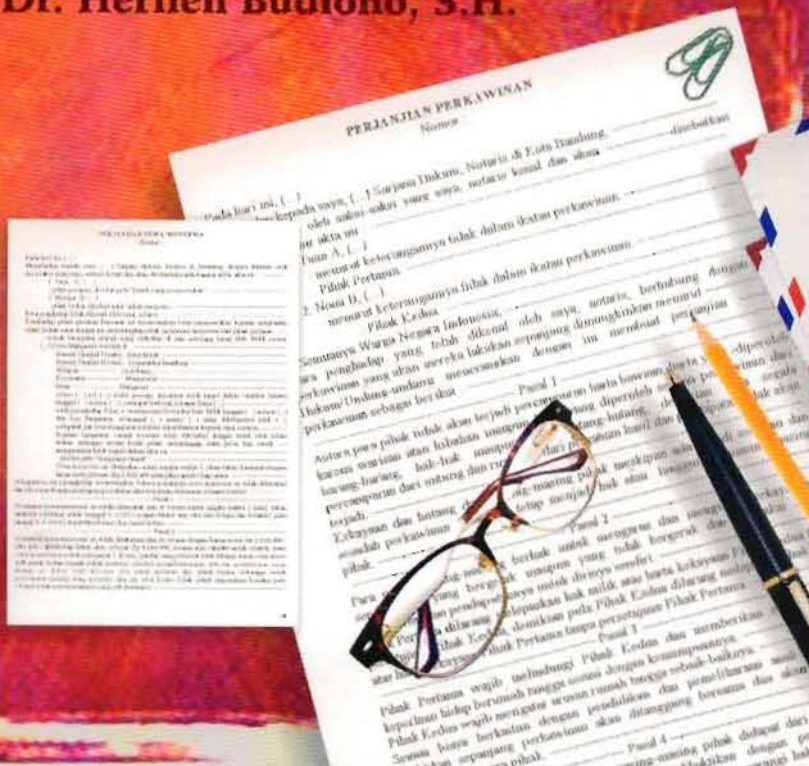




Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris

Dilengkapi dengan CD

Oleh:
Dr. Herlien Budiono, S.H.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENGANTAR.....	1
BAB II BAHASA AKTA.....	3
BAB III AKTA PIHAK(PARTIJ) DAN AKTA BERITA ACARA (RELAAS).....	7
BAB IV BENTUK DAN SIFAT AKTA.....	13
A. AWAL AKTA ATAU KEPALA AKTA	13
1. Judul Akta	13
2. Nomor Akta.....	13
3. Jam, Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun.....	13
4. Nama Lengkap dan Tempat Kedudukan Notaris.....	14
B. BADAN AKTA	17
1. Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan, Tempat Tinggal Para Penghadap, dan/atau Orang yang Mereka Wakili.....	17
2. Keterangan Mengenai Kedudukan Bertindak Penghadap.....	18
a. Kecakapan dan kewenangan bertindak.....	19
b. Ketidakecakapan dan ketidakwenangan bertindak.....	19
3. Isi Akta yang Merupakan Kehendak dan Keinginan dari Para Pihak yang Berkepentingan.....	27
a. Akta pihak (partij).....	27

2) <i>Bagian naturalia</i>	30
3) <i>Bagian accidentalia</i>	30
b. Akta berita acara (relaas)	30
4. Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, serta Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan, dan Tempat Tinggal dari Tiap-Tiap Saksi Pengenal.....	31
C. AKHIR ATAU PENUTUP AKTA.....	32
BAB V SALINAN, KUTIPAN, GROSSE, DAN LAIN-LAIN	39
BAB VI JENIS PERJANJIAN BERDASAR PADA SIFAT DAN AKIBAT HUKUMNYA	49
A. PERJANJIAN DI BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILIE-RECHTELIJKE OVEREENKOMST)	50
B. PERJANJIAN KEBENDAAN (ZAKELIJKE OVEREENKOMST)..	50
C. PERJANJIAN OBLIGATOIR (OBLIGATOIRE OVEREENKOMST)	50
D. PERJANJIAN MENGENAI PEMBUKTIAN (PROCESRECHTELIJKE OVEREENKOMST, BEWIJSOVEREENKOMST).....	50
E. PERJANJIAN BERSIFAT KEPUBLIKAN (PUBLIEKRECHTELIJKE OVEREENKOMST).....	63
BAB VII PEMBAGIAN PERJANJIAN OBLIGATOIR	65
A. PERJANJIAN BERNAMA DAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA	65
B. PERJANJIAN KONSENSUIL, RIIL, DAN FORMIL	73
1. Perjanjian Konsensuil	73
2. Perjanjian Riil	73
a. Perjanjian penitipan barang.....	74
b. Perjanjian pinjam pakai	81
c. Perjanjian pinjam-meminjam.....	86
3. Perjanjian Formil.....	91
C. PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN BANTUAN.....	97
BAB VIII PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)/PERSEROAN	109
A. PERSEROAN PERDATA NOTARIS	112
B. PERSEROAN FIRMA	124

2) <i>Bagian naturalia</i>	30
3) <i>Bagian accidentalia</i>	30
b. Akta berita acara (relaas)	30
4. Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, serta Pekerjaan, Jabatan, Kedudukan, dan Tempat Tinggal dari Tiap-Tiap Saksi Pengenal.....	31
C. AKHIR ATAU PENUTUP AKTA.....	32
BAB V SALINAN, KUTIPAN, GROSSE, DAN LAIN-LAIN	39
BAB VI JENIS PERJANJIAN BERDASAR PADA SIFAT DAN AKIBAT HUKUMNYA	49
A. PERJANJIAN DI BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILIE-RECHTELIJKE OVEREENKOMST)	50
B. PERJANJIAN KEBENDAAN (ZAKELIJKE OVEREENKOMST)..	50
C. PERJANJIAN OBLIGATOIR (OBLIGATOIRE OVEREENKOMST)	50
D. PERJANJIAN MENGENAI PEMBUKTIAN (PROCESRECHTELIJKE OVEREENKOMST, BEWIJSOVEREENKOMST).....	50
E. PERJANJIAN BERSIFAT KEPUBLIKAN (PUBLIEKRECHTELIJKE OVEREENKOMST).....	63
BAB VII PEMBAGIAN PERJANJIAN OBLIGATOIR	65
A. PERJANJIAN BERNAMA DAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA	65
B. PERJANJIAN KONSENSUIL, RIIL, DAN FORMIL	73
1. Perjanjian Konsensuil	73
2. Perjanjian Riil	73
a. Perjanjian penitipan barang.....	74
b. Perjanjian pinjam pakai	81
c. Perjanjian pinjam-meminjam.....	86
3. Perjanjian Formil.....	91
C. PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN BANTUAN.....	97
BAB VIII PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)/PERSEROAN	109
A. PERSEROAN PERDATA NOTARIS	112
B. PERSEROAN FIRMA	124

C. PERSEROAN KOMANDITER.....	131
D. PERSEROAN TERBATAS.....	147
BAB IX YAYASAN.....	181
BAB X PERKUMPULAN.....	189
BAB XI PERWAKILAN, KUASA, DAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA..	201
A. PERWAKILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.....	201
B. PERWAKILAN BERDASARKAN PERJANJIAN DAN KUASA....	206
C. PERWAKILAN ORGANIK.....	221
BAB XII PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN.....	223
A. GADAI	224
B. PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA	234
C. JAMINAN PENANGGUNGAN UTANG (BORGTOUCHT).....	244
BAB XIII HAPUSNYA PERIKATAN DAN CESSIE.....	259
A. PEMBAYARAN.....	259
B. SUBROGASI.....	259
C. NOVASI	266
D. CESSIE (PASAL 613 KUHPERD)	274
DAFTAR PUSTAKA.....	279
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
LAMPIRAN I PERKUMPULAN-PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM.....	283
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA.....	287
LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PE- LAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.....	297

* * * * *